

	UNIVERSITAS MULAWARMAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Jl. Kuaro Kampus Gunung Kelua Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) 743820, 748662, 746503 Fax. (0541) 743820 Samarinda 75119 Email: fisip@fisip-unmul.ac.id Website: http://www.fisip-unmul.ac.id	KODE
		Revisi: 2
		POB/KSP-08/Fisip-Unmul/VIII/2019
IDENTITAS DOKUMEN	PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) PENGAJUAN DANA OPERASIONAL	TANGGAL PEMBUATAN 17 Juni 2019
		TANGGAL CETAK 20 Juli 2019
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	TANGGAL REVISI 22 Agustus 2019
DISAHKAN OLEH	GUGUS JAMINAN MUTU FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	TANGGAL IMPLEMENTASI 30 Agustus 2019

1. TUJUAN

- 1.1. POB ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai pengajuan dana operasional di FISIP.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup POB ini meliputi:

- 2.1. Tata cara pengajuan dana operasional.
- 2.2. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengajuan dana operasional.

3. DEFINISI/KATA KUNCI

- 3.1. Pengajuan dana operasional adalah mekanisme yang harus dilaksanakan untuk mengetahui cara membuat RAB dan mengajukan dana operasional di Fakultas.

4. PENGGUNA

Pengguna POB ini adalah:

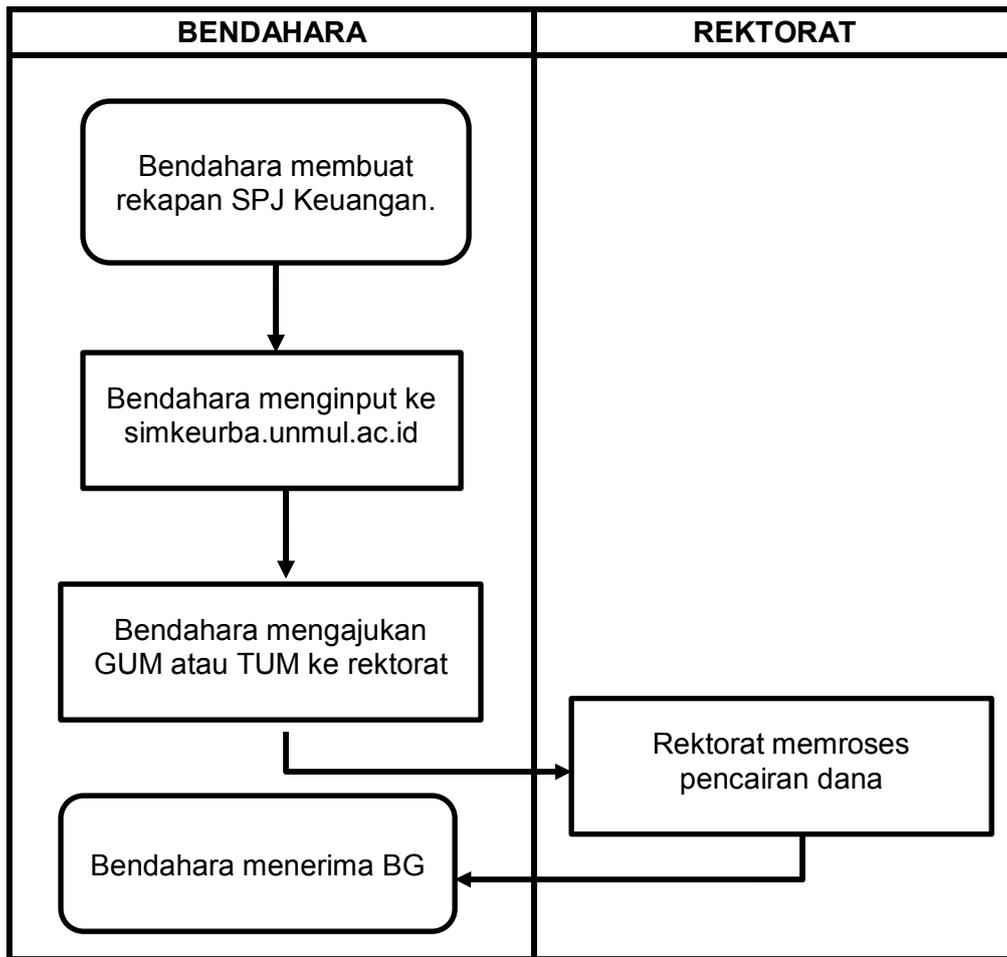
- 4.1. Bendahara / Kasubbag Keuangan
- 4.2. Rektorat

5. PROSEDUR

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Bendahara membuat rekapan SPJ (surat pertanggungjawaban) Keuangan.	Bendahara	Surat Pertanggung Jawaban Keuangan	1 hari	Berkas surat
2	Bendahara menginput ke simkeurba.unmul.ac.id	Bendahara	Surat pertanggung jawaban keuangan	1 hari	Draft SPJ
3	Bendahara melalui Kasubbag Keuangan mengajukan GUM (ganti uang muka) atau TUM (tambahan uang muka) ke Rektorat	Bendahara	Surat pertanggung jawaban keuangan	1 hari	Berkas surat
4	Rektorat memroses pencairan dana ke Kasubbag Keuangan	Rektorat	Surat pertanggung jawaban keuangan	7 hari	Pencairan dana
5	Bendahara menerima Billing Giro	Bendahara	Kwitansi/ Bukti pembayaran	3 hari	Pencairan dana

6. ALUR KERJA

Alur kerja pengajuan dana operasional dapat dilihat sebagai berikut:



7. REFERENSI

- 7.1. UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 7.2. UU No.1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara.
- 7.3. UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
- 7.4. Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan.